

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN INTELIJEN
KEUANGAN

NOMOR KEP-39/TI/2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN TEKNOLOGI, INFORMASI,
DAN INTELIJEN KEUANGAN TAHUN 2025-2029

KEPALA BADAN TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN INTELIJEN KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan sistem perencanaan pembangunan nasional, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan perlu menetapkan Rencana Strategis Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan tentang Rencana Strategis Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83/TPA Tahun 2025;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 904);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN INTELIJEN KEUANGAN TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN INTELIJEN KEUANGAN TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disebut Renstra BaTii Tahun 2025-2029, yang terdiri atas:
- a. Pendahuluan;
 - b. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan;
 - c. Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan;
 - d. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan;
 - e. Penutup; dan
 - f. Lampiran, yang meliputi Matriks Kerangka Regulasi, Matriks Kinerja dan Kerangka Pendanaan;
- dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Renstra BaTii Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Peta Strategi dan Rencana Kerja di lingkungan Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan.
- KETIGA : Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra BaTii Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam periode Renstra BaTii Tahun 2025-2029.
- KEEMPAT : Sekretaris Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan selaku koordinator penyusunan Renstra BaTii Tahun 2025-2029 bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan hasil pengendalian dan evaluasi Renstra BaTii Tahun 2025-2029 kepada Kepala Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan.
- KELIMA : Renstra BaTii Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilakukan perubahan, dalam hal:
1. terdapat kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan/atau Peraturan Presiden yang berdampak signifikan pada perubahan tugas dan fungsi dan/atau perubahan sasaran strategis dan indikator kinerja;

2. kebijakan nasional terkait perencanaan dan penganggaran, sepanjang berdampak signifikan pada perubahan sasaran strategis dan indikator kinerja; dan/atau
3. hasil pengendalian dan evaluasi terhadap rencana strategis Unit Organisasi oleh Pimpinan Unit Eselon I sepanjang tidak bertentangan dengan Rencana Strategis Kementerian Keuangan.

KEENAM : Perubahan Rencana Strategis BaTii Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA ditetapkan setelah melalui proses penelaahan oleh Sekretaris Jenderal, Kementerian Keuangan c.q. Biro Perencanaan dan Keuangan.

KETUJUH : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Kepala Badan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Wakil Menteri Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan; dan
5. Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2025

KEPALA BADAN TEKNOLOGI, INFORMASI,
DAN INTELIJEN KEUANGAN,



Ditandatangani secara elektronik
SURYO UTOMO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN INTELIJEN
KEUANGAN
NOMOR KEP-39/TI/2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN
TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN INTELIJEN
KEUANGAN TAHUN 2025-2029

**RENCANA STRATEGIS BADAN TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN
INTELIJEN KEUANGAN TAHUN 2025-2029**

BAB I
PENDAHULUAN

Rencana Strategis (Renstra) Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan (BaTii), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan BaTii. Selain berfungsi sebagai *guidance* dalam pengambilan kebijakan jangka menengah di lingkungan BaTii, dokumen ini juga menunjukkan peran BaTii dalam mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kemenkeu pada periode pemerintahan tahun 2025-2029.

Secara umum, Renstra BaTii Tahun 2025-2029 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 dan Renstra Kemenkeu Tahun 2025-2029 yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029. Selain itu, penyusunan Renstra BaTii juga memperhatikan beberapa kondisi, yang meliputi perkembangan teknologi, perubahan lingkungan strategis, kebutuhan organisasi, dan sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra BaTii diharapkan mampu menjawab tantangan di bidang transformasi dan manajemen perubahan, teknologi, informasi, dan intelijen keuangan di lingkup Kemenkeu.

Selain itu, dalam mewujudkan visi Kemenkeu “Menjadi penggerak transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan negara serta sektor keuangan yang proaktif, adaptif, dan tepercaya dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”, BaTii telah mengevaluasi kondisi umum dan memetakan potensi dan permasalahan. Bab ini menyajikan kondisi umum BaTii saat ini dan analisa permasalahan, potensi, kelemahan, peluang serta tantangan jangka menengah, baik lingkup BaTii, Kemenkeu, maupun nasional yang akan dihadapi dalam rangka melaksanakan penugasan dan kewenangannya.

1.1 Kondisi Umum

Kondisi umum BaTii berisi gambaran umum pembentukan BaTii dan tiga fungsi utama BaTii yaitu transformasi Kemenkeu yang menjadi salah satu program yang dikoordinasikan oleh BaTii, pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta intelijen keuangan. Selain itu, kondisi umum juga berisi hasil evaluasi yang didapatkan dari hasil audit sertifikasi, *history* survei kepuasan layanan TIK, dan evaluasi implementasi Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kemenkeu 2021-2024, yang walaupun dilakukan sebelum BaTii

terbentuk tetapi masih relevan dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh BaTii.

1.1.1 Pembentukan BaTii

BaTii merupakan unit organisasi baru yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. BaTii mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan TIK, serta pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan. BaTii diresmikan pada tanggal 5 November 2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan dengan pelantikan Kepala BaTii pada tanggal 23 Mei 2025. BaTii dibentuk sebagai bagian dari upaya strategis Kemenkeu dalam mendukung transformasi dan manajemen perubahan yang berkelanjutan dan memperkuat tata kelola TIK, serta intelijen ekonomi dan keuangan.

Transformasi di Kemenkeu merupakan kebutuhan mendesak untuk menjawab tantangan disrupti teknologi yang semakin masif dan dampak perubahan iklim terhadap stabilitas dan ketahanan sektor keuangan. Dalam konteks global yang terus berubah, Kemenkeu dituntut untuk tidak hanya adaptif terhadap perkembangan teknologi digital, tetapi juga mampu membangun sistem pengelolaan keuangan negara yang berkelanjutan, inklusif, dan responsif. Namun demikian, transformasi kelembagaan Kemenkeu masih menghadapi kendala berupa belum terbentuknya unit khusus yang berperan mendorong inovasi dan perubahan berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlanjutan inovasi agar sesuai dengan peta rencana reformasi birokrasi nasional, dalam struktur BaTii, dibentuk Pusat Transformasi dan Manajemen Perubahan yang berfokus pada pengembangan dan pengelolaan inisiatif transformasi kelembagaan dan manajemen perubahan di lingkungan Kemenkeu.

Di samping itu, sebelum pembentukan BaTii, pengelolaan TIK yang mendukung *core* bisnis Kemenkeu dilakukan di masing-masing unit eselon I pengampu secara terdesentralisasi, sementara pengelolaan *common application* dilakukan oleh Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, Sekretariat Jenderal Kemenkeu. Hal ini menyebabkan terjadinya duplikasi sistem, keterbatasan integrasi data dan informasi, serta kurang efisiennya pemanfaatan sumber daya TIK. Menjawab tantangan tersebut, BaTii dibentuk dengan mandat utama untuk menyelenggarakan pengelolaan TIK, yang meliputi SDM, data, dan sistem informasi, yang terpusat dan terintegrasi untuk delapan unit eselon I, meliputi: Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Melalui pendekatan ini, pengelolaan data, sistem informasi, infrastruktur, layanan, dan keamanan informasi dapat dilakukan secara lebih efisien, efektif, dan berstandar tinggi untuk mengharmonisasikan pengelolaan TIK Kemenkeu. Pembentukan BaTii diharapkan dapat meningkatkan interoperabilitas sistem keuangan internal dan eksternal serta efisiensi pengelolaan keuangan negara. Kehadiran BaTii juga merupakan langkah untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan ekonomi, fiskal, dan sektor keuangan yang berbasis *financial intelligence* dan analitik data, guna mendukung pengambilan keputusan strategis

pimpinan secara cepat, akurat, dan berbasis bukti, termasuk dalam rangka *early detection*, *early warning*, dan *scenario planning*.

Dengan terbentuknya BaTii, diharapkan proses transformasi dan manajemen perubahan, TIK, dan intelijen keuangan dapat berjalan lebih sinergis, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang unggul.

1.1.2 Tiga Fungsi Utama BaTii

BaTii memiliki tiga fungsi utama, yaitu pengelolaan transformasi dan manajemen perubahan, pengelolaan TIK, serta analisis intelijen ekonomi dan keuangan. Sebelum BaTii terbentuk, fungsi pengelolaan transformasi dan manajemen perubahan dilaksanakan oleh *Central Transformation Office* (CTO), fungsi pengelolaan TIK dilaksanakan oleh Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan, sedangkan fungsi analisis intelijen ekonomi dan keuangan merupakan fungsi baru di Kementerian Keuangan.

1. Transformasi dan Manajemen Perubahan Kemenkeu

BaTii memiliki tanggung jawab mendorong transformasi dan manajemen perubahan di lingkup Kemenkeu. Transformasi ini merupakan proses keberlanjutan yang telah berjalan sejak tahun 2002 dan terbagi menjadi empat tahap periode, yaitu: Periode I (2002-2006), Periode II (2007-2012), Periode III (2013-2018), dan Periode IV (2019-2024).

A. Periode I (2002-2006)

Transformasi Kemenkeu merupakan respons terhadap kebutuhan reformasi birokrasi dan pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan dan akuntabel. Fokus utama pada periode awal transformasi ini adalah “Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara”, yang ditandai dengan lahirnya tiga paket Undang-Undang Keuangan Negara. Ketiga undang-undang tersebut adalah UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ketiganya menjadi fondasi hukum yang kuat dalam membangun sistem pengelolaan keuangan negara yang modern dan berintegritas.

Sebagai bagian dari reformasi kelembagaan, struktur organisasi Kemenkeu juga mengalami perubahan signifikan. Direktorat Jenderal Anggaran yang sebelumnya menjadi satu-satunya unit pengelola anggaran, dipecah menjadi empat unit Eselon I, yaitu Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang. Selain itu, dibentuk pula Badan Kebijakan Fiskal sebagai unit strategis dalam perumusan kebijakan fiskal nasional. Di sisi lain, modernisasi administrasi perpajakan mulai digulirkan melalui pembentukan *Large Tax Office* dan penerapan sistem *e-filing*, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan dalam pelaporan pajak oleh wajib pajak.

B. Periode II (2007-2012)

Transformasi Kemenkeu pada periode ini adalah “Perbaikan Manajemen Kinerja dan Organisasi”. Kemenkeu melakukan Reformasi Birokrasi secara masif yang dilaksanakan melalui tiga pilar utama, yaitu Pilar Organisasi, Pilar Proses

Bisnis, dan Pilar SDM. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah penerapan *Performance-Based Budgeting* (PBB), yang menekankan penganggaran berdasarkan kinerja dan hasil. Dengan pendekatan ini, alokasi anggaran tidak lagi semata-mata berdasarkan *input*, melainkan dikaitkan langsung dengan *output* dan *outcome* yang diharapkan. Hal ini mendorong efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran serta meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah dalam mencapai target-target pembangunan nasional.

Sebagai bagian dari modernisasi pelayanan publik, Kemenkeu juga melakukan perluasan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Modern, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU-BC), serta Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Percontohan. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha melalui sistem yang lebih transparan, berbasis teknologi, dan berorientasi pada kepuasan pengguna. KPP Modern dan KPPN Percontohan menjadi model pelayanan yang mengedepankan integritas, profesionalisme, dan kemudahan akses, sementara KPU-BC berperan penting dalam mendukung kelancaran arus barang dan pengawasan kepabeanan.

Untuk memperkuat arah dan pengukuran kinerja, Kemenkeu mengadopsi *Balanced Scorecard* (BSC). BSC ini digunakan untuk menyusun peta strategi dan indikator kinerja utama (IKU) yang mencakup perspektif *stakeholder*, pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Proses *cascading* dan *alignment* IKU dilakukan secara sistematis dari level kementerian hingga unit kerja terkecil, memastikan bahwa seluruh pegawai memahami kontribusi mereka terhadap pencapaian visi dan misi organisasi. Dengan sistem ini, evaluasi kinerja menjadi lebih objektif dan terukur, serta mendorong sinergi antarunit dalam mencapai tujuan bersama.

Sebagai penguatan budaya kerja, Kemenkeu juga menerapkan sistem *reward and punishment* yang berbasis pada pencapaian kinerja. Pegawai yang menunjukkan kinerja unggul diberikan penghargaan, sementara yang tidak memenuhi standar akan mendapatkan pembinaan atau sanksi sesuai ketentuan. Sistem ini bertujuan untuk mendorong motivasi, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan lingkungan kerja yang kompetitif namun sehat. Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kemenkeu telah memberikan dampak positif bagi peningkatan kinerja dalam pelaksanaan tugas, peningkatan pelayanan dan kepercayaan masyarakat.

C. Periode III (2013-2018)

Pada tahun 2013 Kemenkeu merancang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan (Tahun 2013-2019) yang kemudian ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan pada tahun 2014. Cetak biru ini terdiri atas rumusan 87 inisiatif transformasi yang terbagi dalam lima tema yaitu tema perpajakan, tema penganggaran, tema perbendaharaan, tema sentral, serta tema kepabeanan dan cukai. Selain itu, dirumuskan pula sembilan arah kebijakan transformasi organisasi serta penetapan visi Kemenkeu yaitu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang

inklusif di abad ke-21. Pada periode ini pula, pada tahun 2014 dibentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat (CTO) untuk mengawal reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan Kemenkeu di tingkat pusat.

Transformasi Kemenkeu pada periode ini menitikberatkan pada “Kolaborasi Antar Unit” sebagai fondasi utama. Salah satu langkah strategisnya adalah dengan mengimplementasikan berbagai sistem digital seperti SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara), SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi), dan MPN (Modul Penerimaan Negara) untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih modern dan efisien. Ketiga sistem ini dirancang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integrasi data keuangan antar unit kerja. Selain itu, Kemenkeu juga meluncurkan *Joint Program Optimalisasi Penerimaan Negara*, yang merupakan bentuk sinergi lintas unit dalam meningkatkan efektivitas penerimaan negara.

Di samping penguatan sistem dan program, Kemenkeu juga melakukan pembentukan unit baru yaitu Lembaga *National Single Window* (LNSW). LNSW berperan penting dalam mendukung kelancaran arus informasi dan dokumen dalam proses ekspor-impor, serta memperkuat koordinasi antar instansi terkait. Pada periode ini, berbagai inisiatif strategis lintas Unit Eselon I juga mulai diintegrasikan secara lebih sistematis. Hal ini mencerminkan komitmen Kemenkeu dalam membangun tata kelola yang kolaboratif dan adaptif di lingkungan Kemenkeu.

D. Periode IV (2019-2024)

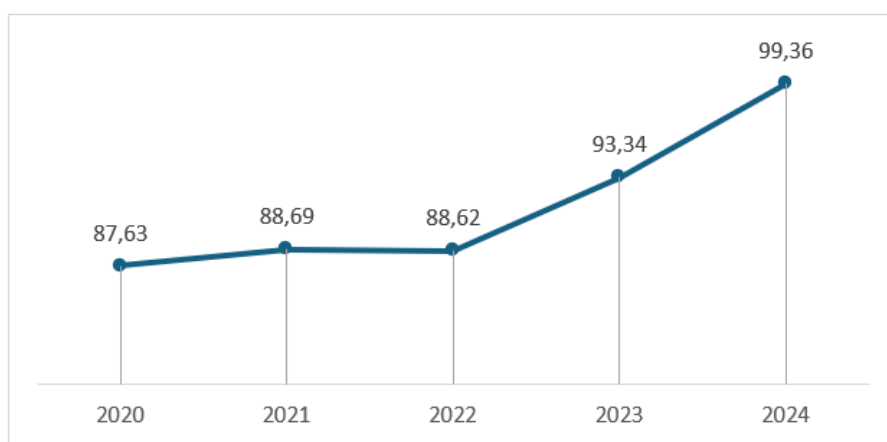
Pada periode IV, transformasi Kemenkeu berfokus pada tiga pilar utama, yaitu Transformasi Kemenkeu Berkelanjutan, Manajemen SDM, dan Penguatan Sektor Keuangan. Untuk mendukung arah strategis ini, Kemenkeu melakukan berbagai langkah inovatif, seperti pengembangan *Single-IT* Sistem Keuangan Negara yang mencakup integrasi antara SAKTI dan KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran), serta pengembangan sistem perpajakan CoreTax dan sistem kepabeanan CEISA 4.0 yang berbasis *Enterprise Architecture* (EA). Selain itu, Kemenkeu juga mulai mengimplementasikan *Super Apps* “Satu Kemenkeu”, sebagai *platform* terpadu untuk meningkatkan efisiensi dan kerja pegawai di lingkungan Kemenkeu.

Transformasi digital Kemenkeu juga diperkuat dengan pemanfaatan *Big Data* dan *Artificial Intelligence* (AI) untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Di sisi organisasi, Kemenkeu melakukan transformasi proses bisnis dan struktur kerja yang berbasis teknologi informasi dan analitik data. Langkah ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas manajemen SDM melalui penguatan budaya kerja, peningkatan kompetensi, serta perbaikan layanan internal. Keseluruhan inisiatif ini mencerminkan komitmen Kemenkeu dalam membangun institusi yang adaptif, berkelanjutan, dan berorientasi pada masa depan dan kemajuan teknologi.

Transformasi merupakan perjalanan berkelanjutan yang memerlukan upaya konsisten dan adaptasi terus-menerus. Upaya transformasi yang konsisten ini tercermin dari historis perolehan predikat baik dalam Evaluasi Reformasi Birokrasi nasional 2016 – 2024 yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Nilai evaluasi Reformasi Birokrasi Kemenkeu Tahun 2024 sebesar 99,36 dan menjadi yang terbaik di antara seluruh instansi pemerintah. Evaluasi Reformasi Birokrasi tersebut dilakukan atas dua jenis, yaitu Reformasi Birokrasi General (sektor hulu/internal birokrasi pemerintahan, antara lain: SPI, SAKIP, SPBE, Indeks Kualitas Kebijakan) dan Reformasi Birokrasi Tematik (sektor hilir/layanan langsung kepada masyarakat dengan tema pengentasan kemiskinan, penanganan *stunting*, peningkatan investasi, dan pengendalian inflasi).

Grafik 1.1

Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Kemenkeu Tahun 2020-2024



Untuk memastikan keberlanjutan transformasi, BaTii berkomitmen terus memperkuat fondasi digital, mengembangkan kapabilitas SDM, serta menyempurnakan proses bisnis secara berkesinambungan guna menjawab dinamika kebutuhan organisasi dan tuntutan era digital yang terus berkembang yang memberikan dampak yang positif bagi seluruh pemangku kepentingan.

2. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Dalam melaksanakan fungsi TIK, BaTii dipercaya mengelola beberapa *Core System* APBN dan *Office Automation* di lingkungan Kemenkeu. Sistem-sistem tersebut antara lain:

- a. SatuDJA (Sistem Aplikasi Terpadu Direktorat Jenderal Anggaran)
Merupakan aplikasi yang digunakan untuk mempermudah proses penganggaran dengan mengintegrasikan tahapan proses penganggaran dalam sebuah sistem.
- b. SIMPONI (Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak *Online*)
Merupakan sistem yang digunakan untuk memfasilitasi pembayaran dan penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak secara elektronik.
- c. SIKD (Sistem Informasi Keuangan Daerah)
Sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, dan mengolah data keuangan daerah untuk mendukung pengambilan keputusan pemerintah daerah.

- d. SEHATI (Sistem Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi)
Platform terpadu untuk pengelolaan hibah di lingkungan Kemenkeu.
- e. DMFAS (*Debt Management and Financial Analysis System*)
Sistem manajemen utang dan analisis keuangan yang digunakan untuk penatausahaan utang dan hibah secara akurat dan tepat waktu.
- f. SIPT (Sistem Informasi Pengendalian Terintegrasi)
Sistem informasi terintegrasi yang digunakan sebagai sarana pendukung pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi (SPIT) di lingkungan Kementerian Keuangan, sebagaimana diamanatkan dalam PMK Nomor 83 Tahun 2024 tentang Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- g. PBPK/FRSW (*Platform Bersama Pelaporan Keuangan/Financial Reporting Single Window*)
Sistem pelaporan keuangan satu pintu yang diamanatkan oleh UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, bertujuan menyatukan pelaporan data keuangan dari pelaku usaha ke pemerintah secara terintegrasi untuk integrasi kebijakan fiskal dan moneter.
- h. *Office Automation*
Sistem ini mencakup berbagai aplikasi dan layanan yang dirancang untuk mendukung efisiensi kerja pegawai Kemenkeu melalui otomasi proses administrasi dan komunikasi internal. *Office Automation* ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih modern, efisien, dan *paperless*, sejalan dengan visi Kemenkeu sebagai institusi yang adaptif dan berbasis teknologi informasi.

Pengelolaan *Core System* APBN dan *Office Automation* di lingkungan Kemenkeu memerlukan ekosistem teknologi informasi yang andal, terintegrasi, dan mampu mendukung proses bisnis secara berkelanjutan. Untuk mencapai hal tersebut, organisasi telah menerapkan kerangka tata kelola TIK yang menyeluruh, berlandaskan praktik terbaik yang diatur dalam regulasi internal. Kerangka ini mencakup arah strategis organisasi, pengendalian operasional, standarisasi sistem, serta mekanisme pengawasan yang terintegrasi.

Selain itu, organisasi juga berkomitmen terhadap penerapan standar internasional yang diwujudkan melalui pencapaian berbagai sertifikasi global, antara lain ISO 20000:2018 untuk Manajemen Layanan Teknologi Informasi, ISO 27001:2013 untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi, ISO 9001:2015 untuk Sistem Manajemen Mutu, serta ISO PAS 99:2012 untuk Sistem Manajemen Terintegrasi. Selain itu, Pusat Data Kemenkeu telah memenuhi standar ANSI/TIA-942 dengan peringkat tertinggi yang menegaskan kesiapan operasional berkelas dunia.

Penguatan infrastruktur TIK dilaksanakan secara bertahap melalui pengembangan *Smart Data Center* (DC) yang dimulai sejak 2021. Fase awal difokuskan pada peningkatan kapasitas struktur bangunan dan sistem mekanikal-elektrikal, dilanjutkan dengan pembangunan gedung pengelola pusat data. Pada tahun 2024, pengembangan memasuki fase ketiga dengan penyelesaian ruang DC lantai 5 dan 6.

Akselerasi transformasi digital juga diwujudkan melalui proyek strategis TIK, antara lain: modernisasi infrastruktur dan manajemen jaringan, implementasi *platform* Kemenkeu *Cloud Platform* (KCP) dengan layanan *self-service*, pengembangan Kemenkeu *Service Bus* (KSB) untuk integrasi sistem dan data, serta digitalisasi layanan umum. *Platform* Satu Data dikembangkan sebagai portal terpadu yang menyediakan layanan pencarian, permohonan, dan pemanfaatan data, dilengkapi dengan perangkat visualisasi dan analitik.

Berbagai strategi yang dilaksanakan tersebut berkontribusi terhadap pencapaian berbagai indikator yang terkait, antara lain:

Tabel 1.1
Pencapaian Target Indikator Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis	No	Nama IKU	Target/Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
Sistem Informasi yang andal dan terintegrasi	1	Tingkat <i>downtime</i> sistem TIK	T: 0,1%	T: 0,1%	T: 0,1%	T: 0,1%	T: 0,1%
			R: 0,0251%	R: 0,0106%	R: 0,0145%	R: 0,0242%	R: 0,0244%
	2	Persentase penyelesaian proyek strategis TIK	T: 85%	T: 87%	T: 90%	T: 92%	T: 95%
			R: 98,41%	R: 99,59%	R: 99,86%	R: 108,00%	R: 112,60%

Keberhasilan strategi ini tercermin dalam pencapaian IKU tahun 2024, di mana tingkat *downtime* sistem TIK terjaga di bawah 0,025 (jauh lebih rendah dari target 0,10%), sementara tingkat penyelesaian proyek strategis TIK mencapai 112,60%, melampaui target sebesar 95%. Capaian ini mengindikasikan efektivitas pengelolaan proyek dan keandalan sistem yang telah dibangun.

3. Intelijen Keuangan

Menteri Keuangan membutuhkan informasi strategis yang luas, heterogen, dan dinamis sehingga Kemenkeu memerlukan pengelolaan informasi strategis melalui pendekatan fungsi intelijen ekonomi dan keuangan. Sebelumnya, kegiatan intelijen ekonomi dan keuangan bekerja secara *ad hoc* dan terdesentralisasi pada unit eselon I di Kemenkeu, menghasilkan informasi dan analisis yang belum secara holistik menangkap esensi dari data yang dikumpulkan. Oleh karena itu, Menteri Keuangan membentuk BaTii sebagai respons terhadap kebutuhan fungsi intelijen ekonomi dan keuangan yang belum terintegrasi secara kelembagaan.

Fungsi intelijen ekonomi dan keuangan pada BaTii menekankan kepada *early detection*, *early warning*, dan *scenario planning* yang diharapkan mampu menghadapi berbagai kemungkinan kondisi ekonomi dan keuangan di masa depan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang cepat, akurat, dan strategis. Pelaksanaan fungsi intelijen ekonomi dan keuangan diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan ekonomi, fiskal, dan sektor keuangan melalui pemanfaatan kerja sama intelijen dan *data analytics* guna mendukung pengambilan keputusan strategis pimpinan.

1.1.3. Aspirasi Masyarakat

Upaya peningkatan pengelolaan TIK dilakukan dengan mengacu kepada berbagai sumber evaluasi, antara lain hasil survei kepuasan pengguna layanan TIK, temuan audit sertifikasi pada unit TIK Pusat tahun 2024, serta hasil Evaluasi Implementasi Peta Rencana SPBE Kemenkeu periode 2021–2024.

Survei kepuasan pengguna layanan TIK yang dilaksanakan oleh Unit TIK Pusat pada tahun 2024 menjadi tolak ukur BaTii untuk mengembangkan inovasi layanan TIK dengan memberikan gambaran persepsi dan kepuasan pengguna serta mengetahui harapan yang menjadi acuan pengembangan layanan lebih lanjut. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar layanan telah memenuhi harapan pengguna meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan. Analisis *gap* antara harapan dan kinerja mengidentifikasi kebutuhan perbaikan utama pada aspek *Service Quality*, khususnya kepedulian tim dalam menyelesaikan permintaan, yang mengindikasikan perlunya peningkatan empati, pendampingan, dan penyelesaian permasalahan secara menyeluruh. Prioritas kedua adalah peningkatan kemudahan menghubungi *Service Desk* melalui penyediaan lebih banyak saluran komunikasi dan respons yang lebih cepat, sedangkan prioritas ketiga adalah ketepatan solusi dan kepatuhan terhadap norma waktu yang memerlukan sistem pemantauan proses dan eskalasi yang lebih efektif. Berdasarkan analisis tersebut, terdapat ekspektasi bagi BaTii untuk meningkatkan komunikasi dan respons layanan, khususnya pada layanan dengan hasil kinerja di bawah rata-rata, serta memberikan pelatihan bagi tim *Service Desk* untuk memperkuat kualitas layanan secara keseluruhan.

Hasil audit sertifikasi pada Unit TIK Pusat di tahun 2024 menunjukkan bahwa penerapan sistem manajemen terintegrasi telah dilaksanakan secara konsisten, yang tercermin dari tidak adanya temuan mayor dalam proses audit eksternal. Pencapaian ini membuktikan bahwa upaya pengendalian dan penerapan standar manajemen telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meskipun demikian, masih terdapat ruang perbaikan terutama dalam aspek komunikasi dan penyalarsan tugas dan fungsi organisasi. Diperlukan forum diskusi untuk meninjau kemungkinan tumpang tindih maupun proses yang belum terakomodasi sepenuhnya dalam struktur organisasi, serta sosialisasi tugas dan fungsi terbaru kepada seluruh pegawai untuk memastikan pemahaman yang selaras di seluruh tingkatan. Temuan audit internal menunjukkan bahwa komunikasi manajemen mengenai implementasi *Information Technology Service Management*, *Information Security Management System*, dan *Quality Management System* telah berjalan cukup baik dengan peningkatan kesadaran di masing-masing area. Selanjutnya, sinergi antarperan perlu diperkuat agar informasi yang tersedia pada suatu fungsi dapat dimanfaatkan secara optimal oleh fungsi lainnya, sehingga organisasi semakin adaptif dalam menghadapi perubahan kebutuhan dan tantangan operasional.

Selain itu, organisasi perlu melakukan tinjauan menyeluruh terhadap berbagai dokumen acuan pelaksanaan kegiatan, mencakup identifikasi permasalahan internal dan eksternal, analisis risiko, serta manajemen perubahan yang diperlukan apabila terjadi penyesuaian jenis layanan. Dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang TIK, organisasi telah menyelenggarakan berbagai program pelatihan namun memerlukan mekanisme evaluasi untuk mengukur

keberhasilan secara nyata serta pemutakhiran data pelatihan pada sistem *Human Resources Information System* (HRIS) untuk mendokumentasikan rekam jejak kompetensi setiap individu. Pengelolaan *threat intelligence* yang telah berjalan baik dapat ditingkatkan melalui penyempurnaan pengelolaan perangkat server dengan fitur notifikasi pembaruan perangkat lunak otomatis untuk meminimalisasi keterlambatan dan mencegah kerentanan keamanan. Organisasi juga perlu memastikan pelaksanaan rencana tindakan perbaikan secara kolaboratif dengan tim teknis terkait, memperluas lingkup identifikasi aset hingga mencakup seluruh lisensi perangkat lunak dan *tools*, serta mengintegrasikan pembaruan katalog layanan dengan mekanisme manajemen perubahan agar proses dapat terdokumentasi dan berkesinambungan. Upaya-upaya ini penting untuk memastikan arah kebijakan dan pelaksanaan operasional tetap selaras dengan dinamika lingkungan strategis.

Dalam konteks yang lebih luas, evaluasi implementasi Peta Rencana SPBE Kemenkeu periode 2021-2024 menunjukkan bahwa keseluruhan kegiatan transformasi digital telah dilaksanakan dengan capaian signifikan, antara lain pemutakhiran kebijakan arsitektur SPBE, penetapan grand design integrasi aplikasi, pengembangan *Smart DC* dan KCP, implementasi teknologi *Software-Defined Wide Area Network*, serta penguatan keamanan informasi melalui *digital signature* dan *multi factor authentication*. Pencapaian ini menjadi landasan kuat bagi pengembangan strategi TIK ke depan, meskipun masih terdapat sejumlah kegiatan yang perlu dilanjutkan dalam Peta Rencana SPBE tahun 2025-2029. Kegiatan tersebut mencakup penyempurnaan dan penguatan kepatuhan terhadap tata kelola TIK yang selaras dengan perubahan organisasi, penyusunan regulasi manajemen perubahan dan risiko, pemutakhiran dan pendetailan arsitektur seluruh domain, penguatan keamanan interoperabilitas antaraplikasi, serta penyusunan strategi layanan Kemenkeu yang *user centric* dengan penguatan *omni channel* dan fungsi *contact center*. Selain itu, diperlukan pemutakhiran katalog layanan pasca restrukturisasi organisasi dan pelaksanaan Audit TIK SPBE Eksternal oleh Lembaga Pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (LATIK) untuk memastikan keberlanjutan peningkatan kualitas layanan dan tata kelola TIK yang komprehensif di lingkungan Kemenkeu.

1.2. Potensi dan Permasalahan

BaTii telah melakukan identifikasi berbagai kekuatan dan potensi yang menjadi kunci keberhasilan pencapaian visi, misi, dan tujuan BaTii serta dukungan terhadap visi misi Kemenkeu dan agenda pembangunan nasional, sekaligus permasalahan yang perlu diantisipasi agar program dapat berjalan efektif. BaTii mengidentifikasi potensi dan permasalahan pada tiga area utama yaitu: 1) Transformasi dan Manajemen Perubahan, 2) Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan 3) Data dan Informasi.

A. Transformasi dan Manajemen Perubahan

Potensi:

- 1) Komitmen yang tinggi dari para pimpinan di Kemenkeu terhadap transformasi yang mendorong pelaksanaan transformasi di Kemenkeu yang berkelanjutan;
- 2) Upaya transformasi yang konsisten tercermin dari historis perolehan predikat baik dalam Evaluasi Reformasi Birokrasi nasional 2015–2024;

- 3) Program transformasi dan manajemen perubahan yang disusun sejalan dengan program prioritas nasional yang menunjukkan dukungan Kemenkeu terhadap program nasional;
- 4) Adanya unit khusus yang mengkoordinasikan transformasi di Kemenkeu sehingga dapat memastikan arah kebijakan dan implementasi sesuai dengan peta jalan transformasi Kemenkeu.

Permasalahan:

- 1) Ketidakpastian perekonomian global, akibat konflik dan dinamika perekonomian global serta dinamika perlambatan pertumbuhan;
- 2) Kurangnya koordinasi antara unit penyusun program transformasi dengan unit teknis terkait sehingga program transformasi tidak implementatif dan tidak sesuai dengan harapan *stakeholders*;
- 3) Perubahan kebijakan yang dapat mempengaruhi arah transformasi dan manajemen perubahan;
- 4) Percepatan transformasi membutuhkan banyak sumber daya antara lain SDM yang unggul dan inovatif; dan
- 5) Persepsi negatif masyarakat.

B. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Potensi

- 1) Manajemen layanan TIK yang andal dan berstandar internasional yang didukung *Smart DC ANSI/TIA rating 4* diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan dan kualitas layanan;
- 2) Infrastruktur yang terkonsolidasi melalui KCP berpotensi mewujudkan efisiensi anggaran, mengurangi duplikasi sumber daya, dan kemudahan pengelolaan infrastruktur secara terpusat;
- 3) Tersedianya *Disaster Recovery Center (DRC)* yang memastikan keberlangsungan bisnis apabila terjadi *incident* dan *problem major*, maupun kondisi kahar pada DC;
- 4) Komitmen dan dukungan penuh dari pimpinan dalam koordinasi pengelolaan data dan informasi melalui peran CIO (*Chief Information Officer*) dan CDO (*Chief Data Officer*), penerapan arsitektur kelembagaan Kemenkeu melalui peran CEA (*Chief Enterprise Architect*), serta penguatan keamanan informasi oleh CISO (*Chief Information Security Officer*) yang mendukung pembangunan *Core System APBN* dan *Office Automation* yang *interoperable*; dan
- 5) *Delaying* organisasi yang mempercepat proses bisnis dan SDM TIK yang terdiri dari generasi muda (Y, Z) dengan pengelolaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer.

Permasalahan

- 1) Meningkatnya ancaman serangan siber global yang semakin kompleks dan canggih;
- 2) Perubahan regulasi digital nasional yang cepat;
- 3) Perubahan model bisnis TIK yang dinamis dapat mempengaruhi organisasi;
- 4) Keterbatasan interoperabilitas antar sistem TIK seperti *Core System APBN* dan *Office Automation*; dan
- 5) Ketersediaan dan kompetensi SDM TIK belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan organisasi.

C. Data dan Informasi

Potensi:

- 1) Telah adanya jaringan kerja sama dengan komunitas internal Kemenkeu dan eksternal sehingga mempermudah akses ke data keuangan dan perekonomian negara yang komprehensif yaitu data internal Kemenkeu maupun eksternal;
- 2) Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang memadai diharapkan dapat mendukung proses analitik data yang besar secara lebih cepat dan komprehensif;
- 3) Adanya unit khusus yang dapat memberikan rekomendasi berbasis data dan analisis ekonomi, fiskal dan sektor keuangan bagi pengambil kebijakan di Kemenkeu; dan
- 4) Meningkatnya *awareness* dan literasi pimpinan dan pegawai Kemenkeu terhadap data.

Permasalahan:

- 1) Keterbatasan SDM yang memiliki keahlian dalam analisis data serta SDM dengan kualifikasi khusus di bidang analisis ekonomi, fiskal, dan sektor keuangan;
- 2) Kompleksitas kejahatan keuangan modern dan potensi disinformasi dalam ekosistem digital.
- 3) Belum adanya standar terkait *metadata*, kualitas, taksonomi, dan pengamanan data.
- 4) Implementasi pengamanan data dan perlindungan data pribadi yang belum diterapkan secara komprehensif.

BAB II

VISI, MISI, NILAI-NILAI, TUJUAN, & SASARAN STRATEGIS

1.1. Visi

Visi BaTii tahun 2025 – 2029 adalah menjadi penggerak utama transformasi Kementerian Keuangan melalui penyediaan teknologi terkini dan informasi yang berkualitas untuk menjaga kebijakan ekonomi, fiskal, dan sektor keuangan dalam rangka mewujudkan Visi Kementerian Keuangan.

1.2. Misi

Dalam rangka mewujudkan pencapaian visi, BaTii menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan peta jalan transformasi yang inovatif, berkelanjutan dan berdampak untuk penyempurnaan proses bisnis Kementerian Keuangan.
2. Mewujudkan layanan digital yang berkualitas, mudah, dan andal melalui pengembangan arsitektur, tata kelola, sistem, serta infrastruktur teknologi informasi yang terkini, terintegrasi, dan didukung oleh penguatan keamanan informasi.
3. Menyediakan data yang berkualitas tinggi, akurat, dan relevan untuk penyusunan strategi dan arah kebijakan.
4. Memanfaatkan dan mengolah informasi untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan ekonomi, fiskal, dan sektor keuangan.
5. Mengelola sumber daya organisasi secara adaptif dan efisien.

Selain itu, BaTii melaksanakan nilai-nilai Kementerian Keuangan untuk mewujudkan Kementerian Keuangan sebagai institusi pemerintah yang terbaik, berkualitas, bermartabat, tepercaya, dan dihormati. Nilai-nilai ini menjadi dasar dan pondasi bagi seluruh pegawai Kementerian Keuangan dalam bekerja dan bersikap untuk mendukung peningkatan kinerja institusi. Nilai-nilai Kementerian Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 312/KMK.01/2011 tentang Nilai-nilai Kementerian Keuangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Integritas
Dalam integritas terkandung makna bahwa dalam berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kemenkeu melakukannya dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral. Pelaksanaan nilai-nilai Kemenkeu diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama integritas sebagai berikut:
 - a. Bersikap jujur, tulus, dan dapat dipercaya;
 - b. Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela.
2. Profesionalisme
Dalam profesionalisme terkandung makna bahwa dalam bekerja, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kemenkeu melakukannya dengan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi. Pelaksanaan nilai-

nilai Kemenkeu diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama profesionalisme sebagai berikut:

- a. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang luas;
- b. Bekerja dengan hati.

3. Sinergi

Dalam sinergi terkandung makna bahwa Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kemenkeu memiliki komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas. Pelaksanaan nilai-nilai Kemenkeu diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama sinergi sebagai berikut:

- a. Memiliki sangka baik, saling percaya, dan menghormati;
- b. Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik.

4. Pelayanan

Dalam pelayanan terkandung makna bahwa dalam memberikan pelayanan, Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kemenkeu melakukannya untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan dan dilaksanakan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman. Pelaksanaan nilai-nilai Kemenkeu diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama pelayanan sebagai berikut:

- a. Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan;
- b. Bersikap proaktif dan cepat tanggap.

5. Kesempurnaan

Dalam kesempurnaan terkandung makna bahwa Pimpinan dan seluruh PNS di lingkungan Kemenkeu senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik. Pelaksanaan nilai-nilai Kemenkeu diwujudkan dalam kaidah-kaidah perilaku utama kesempurnaan sebagai berikut:

- a. Melakukan perbaikan terus menerus;
- b. Mengembangkan inovasi dan kreativitas.

1.3. Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan misi, BaTii menetapkan lima tujuan sebagai berikut:

1. Peta jalan transformasi yang inovatif, berkelanjutan dan berdampak untuk penyempurnaan proses bisnis Kementerian Keuangan. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator keberhasilan transformasi Kemenkeu.
2. Layanan digital yang berkualitas, mudah, dan andal. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator keandalan sistem informasi Kemenkeu.
3. Data yang berkualitas tinggi, akurat, dan relevan untuk penyusunan strategi dan arah kebijakan. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator kualitas pengelolaan dan penyediaan data.
4. Informasi yang tepercaya untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan ekonomi, fiskal, dan sektor keuangan. Pencapaian tujuan

tersebut diukur dengan indikator efektivitas rekomendasi intelijen keuangan.

5. Pengelolaan sumber daya organisasi yang adaptif dan efisien. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator kualitas pengembangan SDM, pengelolaan keuangan, dan penerapan pengendalian terintegrasi.

1.4. Sasaran Strategis

Dalam rangka mendukung pencapaian lima tujuannya, BaTii menetapkan sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai oleh BaTii sepanjang tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- 1) Transformasi dan manajemen perubahan Kementerian Keuangan yang berkesinambungan dan berdampak.
- 2) Arsitektur, tata kelola, sistem, dan infrastruktur teknologi informasi yang terkini, terintegrasi, serta aman.
- 3) Data yang akurat dan relevan untuk strategi kebijakan.
- 4) Informasi yang berkualitas dan tepercaya untuk rekomendasi kebijakan ekonomi dan keuangan.
- 5) SDM yang unggul, organisasi yang *agile*, pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) yang akuntabel, serta pengendalian internal yang efektif.

Untuk memastikan pencapaian sasaran strategis tersebut, BaTii telah mengidentifikasi indikasi risiko sebagai berikut:

Tabel 2.1
Indikasi Risiko Pencapaian Sasaran Strategis
Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
1	Transformasi dan Manajemen Perubahan Kementerian Keuangan yang Berkesinambungan dan Berdampak.	Perubahan kebijakan, dinamika perekonomian, dan geo politik yang mempengaruhi arah transformasi	<ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan arah kebijakan Transformasi Kemenkeu yang <i>agile</i> dan fleksibel terhadap perubahan. b. Struktur organisasi yang adaptif untuk cepat merespon perubahan. 	Pusat Manajemen Transformasi dan Perubahan
2	Arsitektur, tata kelola, sistem, dan infrastruktur teknologi informasi yang terkini, terintegrasi, serta aman.	Gangguan operasional layanan TIK Kemenkeu yang mempengaruhi kualitas layanan kepada pengguna	<ol style="list-style-type: none"> a. Mewujudkan layanan digital Kemenkeu yang berkualitas, mudah, dan andal. b. Pengembangan <i>integrated core</i> 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pusat Arsitektur dan Tata Kelola Teknologi Informasi b. Pusat Pengembangan

No	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Perlakuan Risiko
			<p><i>system</i> Kemenkeu dan penyempurnaan sistem informasi Kemenkeu.</p>	<p>Sistem Informasi c. Pusat Infrastruktur, Layanan, dan Keamanan Informasi</p>
3	<p>Data yang akurat dan relevan untuk strategi kebijakan</p>	<p>Rendahnya kualitas data yang diperoleh dan data yang diperoleh tidak sesuai dengan standar dalam mendukung pengambilan keputusan.</p>	<p>a. Perluasan hubungan kerja sama dengan komunitas internal dan eksternal Kemenkeu untuk mempermudah akses ke data yang dibutuhkan. b. Penyusunan standar terkait metadata, kualitas, taksonomi, dan pengamanan data</p>	<p>Pusat Data dan Informasi</p>
		<p>Implementasi <i>Artificial Intelligence</i> yang optimal untuk meningkatkan kualitas layanan [UPSIDE RISK]</p>	<p>Pengembangan dan pemanfaatan <i>Artificial Intelligence</i>.</p>	
4	<p>Informasi yang berkualitas dan tepercaya untuk rekomendasi kebijakan ekonomi dan keuangan.</p>	<p>Kurang akuratnya hasil analisis data intelijen untuk rekomendasi pimpinan</p>	<p>Adopsi teknologi tepat guna dalam menganalisis data dalam jumlah besar menjadi informasi yang berkualitas.</p>	<p>Pusat Intelijen Ekonomi dan Keuangan</p>
5	<p>SDM yang unggul, organisasi yang <i>agile</i>, pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta pengendalian internal yang efektif.</p>	<p>Pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi belum optimal</p>	<p>Pemantauan kesesuaian tugas dan fungsi organisasi secara berkala.</p>	<p>Sekretariat Badan</p>
		<p>Peningkatan kompetensi SDM tidak tercapai</p>	<p>Penyusunan <i>Learning Path</i>.</p>	
		<p>Penerapan pengendalian internal terintegrasi tidak efektif</p>	<p>Penguatan budaya pengendalian dan kepatuhan.</p>	

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA
KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Serta Kementerian

1. Dukungan BaTiii dalam Arah Kebijakan dan Strategi Kemenkeu

RPJMN 2025-2029 merupakan tahapan penting karena merupakan awal dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dengan visi “Indonesia Emas 2045”. Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan delapan misi (agenda) pembangunan yang terdiri atas: (1) Transformasi Sosial; (2) Transformasi Ekonomi; (3) Transformasi Tata Kelola; (4) Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia; (5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; (6) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan; (7) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; serta (8) Kestinambungan Pembangunan.

Selanjutnya, lima Sasaran Pembangunan Nasional ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029, yaitu: (1) Meningkatkan pendapatan per kapita menuju setara negara maju; (2) Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat; (3) Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang; (4) Daya saing SDM meningkat; serta (5) Intensitas emisi GRK (Gas Rumah Kaca) menurun menuju *net zero emission*.

Sasaran pembangunan nasional dimaksud akan dicapai melalui pepadupadanan visi dan misi Presiden dengan kebijakan dalam RPJPN 2025-2045, strategi pembangunan kewilayahan, serta tata kelola pelaksanaan pembangunan. Pepadupadanan visi dan misi Presiden dengan kebijakan dalam RPJPN menghasilkan arah pembangunan dan Prioritas Nasional yang akan dilaksanakan oleh K/L.

Dari delapan prioritas pembangunan nasional (Asta Cita) yang merupakan wujud implementasi langsung dari misi Presiden, Kemenkeu mendukung pelaksanaan seluruh prioritas ini melalui pengalokasian anggaran dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka implementasi Prioritas Nasional maupun pelaksanaan berbagai strategi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kemenkeu.

BaTii sebagai bagian dari Kemenkeu, juga turut mendukung tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan strategi dalam Renstra Kemenkeu. Tujuan Kemenkeu yang terkait dengan BaTii adalah Tujuan 5 “Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu, yang mendorong akselerasi transformasi birokrasi nasional. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator yaitu Indeks Kepuasan Pengguna Layanan.” Sedangkan untuk Sasaran Strategis yang berkaitan dengan BaTii adalah Sasaran Strategis 5, yaitu: “Birokrasi terintegrasi yang melayani, transformatif, efisien, dan berintegritas.”

Dalam mendukung pencapaian Prioritas Nasional dan Tujuan Kemenkeu tersebut, arah kebijakan dan strategi pada Renstra Kemenkeu 2025-2029 yang berhubungan dengan BaTii, meliputi:

a. Arah Kebijakan Transformasi pengelolaan sumber daya dan pengendalian intern, melalui strategi Simplifikasi dan redesain EA dalam Sistem Informasi Kemenkeu guna mempercepat *reengineering* proses bisnis utama Kemenkeu.

BaTii berperan melalui pengembangan dan pemutakhiran arsitektur Kemenkeu yang menjadi kerangka kerja strategis untuk memastikan keselarasan antara proses bisnis, aplikasi, data, dan teknologi.

b. Arah Kebijakan Modernisasi dan konsolidasi ekosistem kerja, melalui strategi:

1) Modernisasi infrastruktur TIK dengan pemanfaatan teknologi tepat guna dan peningkatan keandalan sistem, serta pengembangan keterpaduan dan optimalisasi pemanfaatan data (*data enablement*).

Peran BaTii yaitu sebagai berikut:

a) modernisasi dan peningkatan kapasitas infrastruktur TIK secara berkelanjutan;

b) optimalisasi *data analytics*; dan

c) implementasi inovasi berbasis teknologi tepat guna.

2) Penguatan *integrated core system* Kemenkeu dan penyempurnaan sistem informasi Kemenkeu (kecerdasan buatan, *Single Profile*, dan *Customer Relationship Management* yang berkualitas).

BaTii berperan melakukan pembangunan dan pengembangan sistem informasi yang aman, andal dan mendukung interoperabilitas antar sistem, mengembangkan *platform data analytics* dan AI mandiri Kemenkeu, serta mewujudkan *single profile* sesuai arsitektur Kemenkeu.

3) Pemutakhiran tata kelola yang mendukung terwujudnya transformasi digital serta penguatan interoperabilitas ekosistem digital terintegrasi, ditandai dengan disusunnya Peta Jalan Pengembangan TIK Kemenkeu Tahun 2025-2029.

BaTii berperan dalam melaksanakan:

a) Pemutakhiran Tata Kelola TIK Kemenkeu; dan

b) Penyusunan dan pemutakhiran Peta Rencana SPBE Kemenkeu (Peta Jalan Pengembangan TIK Kemenkeu) dan arah kebijakan transformasi dan manajemen perubahan Kemenkeu.

4) Penyajian hasil analisis untuk mendukung *decision making*, *alert*, dan *early warning*.

Peran BaTii yaitu melalui pengembangan sistem *early detection*, *early warning*, dan *scenario planning* untuk analisis kebijakan ekonomi dalam negeri dan global, serta mengantisipasi krisis keuangan.

- 5) Penguatan infrastruktur keamanan informasi, penguatan pengelolaan dan pengendalian keamanan informasi, penerapan *data security*, dan penguatan keamanan interoperabilitas antaraplikasi.

Peran BaTii yaitu melalui peningkatan sistem keamanan informasi *end-to-end*, penyempurnaan kebijakan keamanan informasi, penguatan kontrol akses, proteksi data sensitif, dan pemantauan aktivitas untuk mencegah kebocoran informasi. Selain itu, BaTii menerapkan protokol komunikasi yang terenkripsi dan autentikasi yang kuat, sehingga kolaborasi antar aplikasi tetap terlindungi dari potensi risiko keamanan.

- c. Arah Kebijakan Peningkatan kualitas layanan publik, melalui strategi Pengembangan dan perluasan implementasi *shared service* Kemenkeu.

Peran BaTii dalam hal ini diwujudkan melalui pengembangan dan perluasan implementasi *Office Automation* Kemenkeu serta infrastruktur TIK area pusat data yang digunakan secara bagi pakai oleh unit Eselon I/Non Eselon di lingkungan Kemenkeu antara lain KCP, KSB, dan *Big Data* Kemenkeu.

2. Pengarusutamaan

BaTii berkomitmen mengintegrasikan pengarusutamaan dalam Rencana Kerja periode 2025-2029 dengan kebijakan umum sebagai berikut:

- a. Gender dan Inklusi Sosial

Upaya peningkatan kesetaraan gender dilaksanakan melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan inklusi sosial dengan memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan laki-laki, pemuda, anak, penyandang disabilitas, lanjut usia, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya. Kesempatan ini ditujukan untuk meningkatkan akses seluruh kelompok terhadap sumber daya, mendorong mereka berpartisipasi aktif dan bermakna dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan, serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Implementasi PUG dan inklusi sosial pada BaTii dilakukan dengan strategi pencapaian sebagai berikut:

- 1) Pelembagaan PUG dan inklusi sosial Kemenkeu antara lain melalui penguatan komitmen dan peningkatan kapasitas SDM terkait PUG dan inklusi sosial.
- 2) Memperkuat penyelenggaraan PUG dan inklusi sosial yang berorientasi pada pencapaian *output* dan *outcome* antara lain melalui (a) integrasi perspektif gender dan inklusi sosial pada perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan; (b) penguatan peran Unit Kepatuhan Internal (UKI); dan (c) Pengembangan media Komunikasi dan Informasi, dan Edukasi (KIE).

b. Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital pada BaTii dilakukan dengan:

- 1) meningkatkan akses dan kualitas pelayanan digital;
- 2) mendorong pembangunan dan penguatan pusat data;
- 3) meningkatkan kualitas SDM digital serta kegiatan dan pemanfaatan riset, pengembangan, serta inovasi;
- 4) mendorong pendataan terpadu, pemanfaatan data, dan adopsi digital, serta literasi digital secara luas;
- 5) meningkatkan keamanan informasi;
- 6) membangun dan mengembangkan tata kelola yang dapat menciptakan dan mengembangkan ekosistem digital yang kondusif bagi masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah.

Implementasi Transformasi Digital pada BaTii dilakukan dengan strategi pencapaian melalui Penyempurnaan Tata Kelola yang Adaptif dan Responsif terhadap Dinamika Perkembangan Teknologi, Peningkatan kualitas layanan digital yang andal, berkualitas, dan inklusif, Penguatan pusat data dan infrastruktur TIK, Peningkatan kualitas SDM digital yang unggul, inovatif, dan adaptif, Penguatan keamanan informasi dan Pengembangan keterpaduan dan optimalisasi pemanfaatan data.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Batii

Arah kebijakan dan strategi BaTii dalam rangka mendukung Prioritas Pembangunan Nasional, mendukung pencapaian tujuan Kemenkeu dan mendorong terwujudnya tujuan BaTii adalah sebagai berikut:

1. Peta jalan transformasi yang inovatif, berkelanjutan dan berdampak untuk penyempurnaan proses bisnis Kementerian Keuangan.
Untuk mendukung tujuan ini, BaTii menjabarkannya melalui arah kebijakan “Pengembangan serta pengelolaan transformasi dan perubahan yang berdampak, akseleratif, dan berkelanjutan”. Arah kebijakan ini diwujudkan melalui strategi:
 - a. Pengembangan program transformasi dan manajemen perubahan yang sejalan dengan program prioritas pemerintah dan Kemenkeu.
 - b. Penguatan komitmen dan peran pimpinan dalam implementasi program transformasi dan manajemen perubahan Kemenkeu.
 - c. Penguatan implementasi program transformasi dan manajemen perubahan Kemenkeu yang akuntabel dan berdampak.
 - d. Penguatan *change management* tentang kesadaran kolektif akan pentingnya perubahan dan strategi penanganan resistensinya.Implementasi arah kebijakan dimaksud, akan dilaksanakan oleh Pusat Manajemen Transformasi dan Perubahan (Pusmantap).
2. Layanan Digital yang berkualitas, mudah, dan andal.
Untuk mendukung tujuan ini, BaTii menjabarkannya melalui beberapa arah kebijakan yang meliputi:

- 1) Arah kebijakan Pengembangan arsitektur dan tata kelola TIK yang *agile*, adaptif dan kolaboratif, diwujudkan melalui strategi:
 - a. Pengembangan EA Kemenkeu dalam mendukung pencapaian arah strategis organisasi dan menjaga harmonisasi ekosistem transformasi digital Kemenkeu.
 - b. Penguatan tata kelola TIK Kemenkeu untuk mendukung transformasi dan ekosistem digital nasional, termasuk arsitektur TIK, interoperabilitas sistem, standarisasi data, serta pengembangan AI, yang selaras dengan regulasi nasional dan sesuai kebutuhan organisasi.
 - c. Peningkatan kualitas dan kepatuhan implementasi tata kelola TIK Kemenkeu.
 - d. Optimalisasi *Research and Development* serta pengelolaan inovasi digital Kemenkeu.

Implementasi arah kebijakan dimaksud, akan dilaksanakan oleh Pusat Arsitektur dan Tata Kelola Teknologi Informasi (Pusakti).

- 2) Arah kebijakan Pengembangan sistem informasi yang berkualitas, aman dan efisien, diwujudkan melalui strategi:
 - a. Pengembangan *Integrated Core APBN* dan *Office Automation (end-to-end)* yang selaras dengan EA dan berdampak untuk mendukung transformasi serta ekosistem digital nasional.
 - b. Penguatan penerapan *Secure Software Development Framework* sesuai tata kelola keamanan sistem untuk memastikan sistem aman dari ancaman siber.
 - c. Peningkatan performa dan efisiensi Sistem Informasi melalui implementasi Standar Pengembangan Sistem dan monitoring Sistem Informasi secara berkelanjutan

Implementasi arah kebijakan dimaksud, akan dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Sistem Informasi (Puspensi).

- 3) Arah kebijakan Penguatan pengelolaan infrastruktur dan layanan teknologi informasi yang aman, andal, serta berkualitas, diwujudkan melalui strategi:
 - a. Modernisasi, standardisasi, dan peningkatan kapasitas infrastruktur TIK pada DC dan DRC secara berkelanjutan untuk menjaga kontinuitas dan keandalan layanan serta mendukung transformasi dan ekosistem digital nasional.
 - b. Penguatan keamanan informasi pada area DC dan DRC melalui implementasi teknologi keamanan modern yang melindungi area TIK secara menyeluruh.
 - c. Peningkatan kualitas pengelolaan dan layanan TIK untuk memastikan dukungan yang andal terhadap proses bisnis dan kinerja pegawai.

Implementasi arah kebijakan dimaksud, akan dilaksanakan oleh Pusat Infrastruktur, Layanan, dan Keamanan Informasi (Pusilki).

3. Data yang berkualitas tinggi, akurat, dan relevan untuk penyusunan strategi dan arah kebijakan.

Untuk mendukung tujuan ini, BaTii menjabarkannya melalui "Pengembangan, pengelolaan, dan penyediaan data dan informasi

yang akurat dan berkualitas tinggi”. Arah kebijakan ini diwujudkan melalui strategi:

- a. Pengembangan ekosistem Satu Data Kemenkeu yang aman, tepercaya, dan terintegrasi melalui penerapan tata kelola dan pengelolaan data yang andal untuk mendorong pemanfaatan dan interoperabilitas data sebagai perwujudan *Single Source of Truth* data Kemenkeu.
- b. Optimalisasi pertukaran data melalui *platform* terstandar untuk data internal kemenkeu dan data eksternal (data Kementerian/Lembaga/ Instansi Daerah, data berlangganan, dan data lainnya) dan meningkatkan pemanfaatan data pemerintah.
- c. Pengembangan *data analytics* dan AI melalui *self-service business intelligence* dan model serta platform AI untuk mendukung pengambilan keputusan dan kebijakan yang berbasis data.

Implementasi arah kebijakan dimaksud, akan dilaksanakan oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin).

4. Informasi yang tepercaya untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan ekonomi, fiskal, dan sektor keuangan.

Untuk mendukung tujuan ini, BaTii menjabarkannya melalui “Penguatan analisis data dan informasi untuk menghasilkan rekomendasi yang berkualitas”. Arah kebijakan ini diwujudkan melalui strategi:

- a. Pengumpulan data dan informasi baik dari internal kemenkeu maupun eksternal, serta penguatan kerja sama intelijen dengan instansi/lembaga lain untuk pemanfaatan dan peningkatan kualitas *Data Operational Intelligence (DOI)*.
- b. Pengembangan sistem *early detection*, *early warning*, dan *scenario planning*, serta penyusunan analisis kebijakan ekonomi dan sistem keuangan dalam negeri dan global.

Implementasi arah kebijakan dimaksud, akan dilaksanakan oleh Pusat Intelijen Ekonomi dan Keuangan (Pusintek).

5. Pengelolaan sumber daya organisasi yang adaptif dan efisien.

Untuk mendukung tujuan ini, BaTii menjabarkan melalui beberapa arah kebijakan yang meliputi:

- 1) Arah kebijakan Pengembangan kapasitas SDM, organisasi, serta keuangan dan BMN yang unggul, *agile*, kredibel, dan akuntabel, diwujudkan melalui strategi:
 - a. Pengembangan kompetensi dan pola karir SDM yang selaras dengan kebutuhan organisasi dan arah kebijakan strategis.
 - b. Perluasan pola kerja kolaboratif berbasis proyek (termasuk *squad team*).
 - c. Pengelolaan keuangan dan BMN yang efisien, adaptif, dan memiliki akuntabilitas yang tinggi untuk mendukung tugas dan fungsi BaTii.

- 2) Arah kebijakan Penguatan pengendalian internal dan komunikasi publik yang transparan, berkeadilan, serta efektif, diwujudkan melalui strategi:
 - a. Penguatan peran UKI melalui institusionalisasi, desain tata kelola, dan berbasis teknologi informasi yang efektif untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan organisasi.
 - b. Integrasi peran tiap lini secara *end to end* dalam pengawasan risiko proses bisnis, SDM, dan TIK (*one view of risk*).
 - c. Implementasi strategi komunikasi yang efektif, inklusif, dan terintegrasi dengan arah kebijakan organisasi untuk membangun citra BaTii dan Kemenkeu yang positif.

Implementasi arah kebijakan dimaksud, akan dilaksanakan oleh Sekretariat Badan (Setban).

3.3. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi harus menunjang kemudahan pencapaian Visi dan Misi Kemenkeu 2025–2029 sebagaimana tertuang dalam Renstra Kemenkeu 2025–2029. Dengan memperhatikan kaidah pembentukan regulasi yang sederhana, mudah dipahami, tertib dan memberi manfaat konkret dalam pelaksanaan pembangunan nasional, BaTii mengajukan beberapa regulasi terkait dengan pemenuhan tujuan dan Sasaran Strategis BaTii Tahun 2025–2029, yaitu sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Kelola TIK Kemenkeu.

Urgensi pembentukan:

- a. perlunya aturan dasar/tata kelola TIK untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan perkembangan TIK;
- b. perlunya aturan dasar/tata kelola TIK untuk meningkatkan peran TIK dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Keuangan serta mendukung transformasi digital di lingkungan Kemenkeu; dan
- c. perlunya penyelarasan dengan kebijakan TIK di level nasional, sehingga PMK Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Kementerian Keuangan perlu dimutakhirkan.

RPMK tentang Tata Kelola TIK Kemenkeu rencananya akan diselesaikan pada tahun 2027.

2. Rancangan Keputusan Menteri Keuangan tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Kemenkeu

Urgensi pembentukan:

Perlunya aturan mengenai ketentuan teknis penyelenggaraan SPBE untuk melaksanakan ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyelenggaraan SPBE.

RKMK tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan SPBE rencananya akan diselesaikan pada tahun 2025.

3. Rancangan Keputusan Menteri Keuangan tentang Peta Rencana SPBE Kemenkeu (Peta Jalan Pengembangan TIK Kemenkeu)
Urgensi pembentukan:
Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Kemenkeu, diperlukan peraturan teknis terkait peta rencana SPBE (peta jalan pengembangan TIK Kemenkeu) untuk:
 - a. menyediakan arah yang jelas dan terukur bagi pengembangan SPBE Kemenkeu atau pengembangan TIK Kemenkeu;
 - b. menghindari duplikasi inisiatif dan memastikan keselarasan antar-unit;
 - c. menjamin konsistensi implementasi SPBE atau implementasi TIK dengan target nasional; dan
 - d. meningkatkan efektivitas pemanfaatan sumber daya TIK.RKMK tentang Peta Rencana SPBE Kemenkeu (Peta Jalan Pengembangan TIK Kemenkeu) rencananya akan diselesaikan pada tahun 2026.
4. Rancangan Keputusan Menteri Keuangan tentang Program Transformasi Kemenkeu
Urgensi Pembentukan:
Perlunya aturan yang mengatur mengenai arah kebijakan Kemenkeu selama lima tahun kedepan, program dan rencana prioritas, serta tata kelola transformasi Kemenkeu.
RKMK tentang Program Transformasi Kemenkeu rencananya akan diselesaikan pada tahun 2026.
5. Rancangan Keputusan Menteri Keuangan tentang Ketentuan Teknis Tata Kelola TIK Kemenkeu
Urgensi pembentukan:
RKMK ini disusun untuk memutakhirkan RKMK tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan SPBE yang rencananya akan diselesaikan pada tahun 2025 karena adanya penetapan RPMK Tata Kelola TIK Kemenkeu pada tahun 2027.
RKMK tentang Ketentuan Teknis Tata Kelola TIK Kemenkeu rencananya akan diselesaikan pada tahun 2028.

3.4. Kerangka Kelembagaan

BaTii sebagai bagian dari Kemenkeu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu didukung dengan perangkat organisasi, proses bisnis, dan sumber daya aparatur yang tepat dari segi kuantitas maupun kualitas. Arah kebijakan dari sisi kelembagaan berkaitan erat dengan perbaikan proses bisnis yang diarahkan untuk berbasis digital. Organisasi diharapkan dapat adaptif terhadap perubahan kondisi eksternal, melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan dengan tetap menjaga efisiensi dan efektivitas struktur organisasi.

3.4.1 Kebijakan Pengelolaan Organisasi

A. Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Keuangan, ditegaskan bahwa BaTii mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan. Dalam melaksanakan tugasnya, BaTii menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan, serta transformasi digital dan manajemen perubahan;
- b. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan, serta transformasi digital dan manajemen perubahan;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan, serta transformasi digital dan manajemen perubahan;
- d. pelaksanaan administrasi Badan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

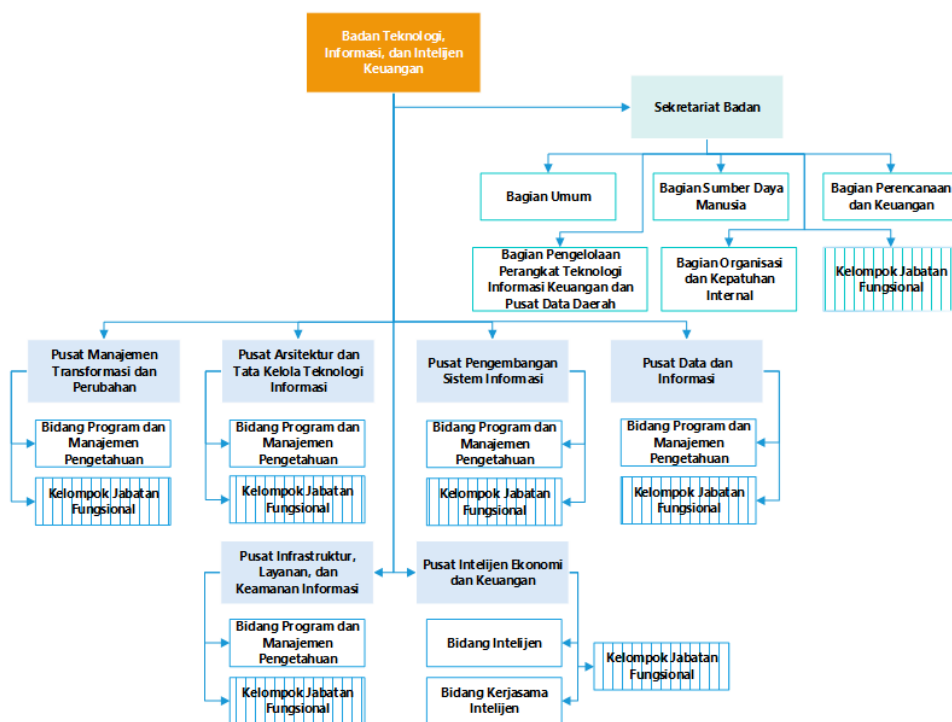
B. Struktur Organisasi

Struktur organisasi BaTii sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1, terdiri atas satu unit sekretariat dan enam unit pusat yang meliputi:

- a. Sekretariat Badan yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan BaTii;
- b. Pusat Manajemen Transformasi dan Perubahan yang memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan transformasi kelembagaan dan manajemen perubahan;
- c. Pusat Arsitektur dan Tata Kelola Teknologi Informasi yang memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perancangan sistem pemerintah berbasis elektronik atau tata kelola dan manajemen teknologi informasi, hubungan kerja sama antar instansi, koordinasi kerja sama teknologi informasi antar instansi, serta penelitian dan pengembangan teknologi;
- d. Pusat Pengembangan Sistem Informasi yang memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perancangan, pengembangan, dan pengendalian mutu sistem informasi keuangan negara;
- e. Pusat Data dan Informasi yang memiliki tugas mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan data dan informasi, serta pengembangan kecerdasan buatan;

- f. Pusat Infrastruktur, Layanan, dan Keamanan Informasi yang memiliki tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan infrastruktur, layanan teknologi informasi, dan keamanan informasi; dan
- g. Pusat Intelijen Ekonomi dan Keuangan yang memiliki tugas melaksanakan koordinasi, perumusan rekomendasi, dan evaluasi kebijakan di bidang intelijen ekonomi dan keuangan, perencanaan, pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan dan pendistribusian informasi intelijen ekonomi dan keuangan untuk deteksi dini dan peringatan dini.

Gambar 3.1 Struktur Organisasi BaTii



C. Arah Kebijakan Kelembagaan

- 1) Transformasi proses bisnis yang adaptif melalui digitalisasi dan simplifikasi proses bisnis.

Transformasi proses bisnis akan difokuskan pada digitalisasi layanan internal dan implementasi *shared services* yang mengutamakan interoperabilitas didukung penguatan kapabilitas EA dan AI sebagai pendorong utama untuk mempercepat harmonisasi lintas domain, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkecil silo antar unit. Arah kebijakan ini dilaksanakan melalui strategi:

- a. Penyusunan mekanisme kerja di lingkungan BaTii.
- b. Penetapan *Business Continuity Plan* (BCP) untuk memastikan manajemen keberlangsungan bisnis.
- c. Penguatan SPIT.

- 2) Penyederhanaan birokrasi dalam kerangka transformasi kelembagaan, data *decision making*, dan *scenario planning*. Arah kebijakan ini dilaksanakan melalui strategi:
 - a. Penguatan kelembagaan melalui penajaman tugas dan fungsi, serta evaluasi struktur organisasi.
 - b. Pemantauan dan evaluasi efektivitas organisasi berbasis fungsional.
 - c. Revisit pengelolaan DRC secara *dedicated*.

- 3) Pengembangan Jabatan Fungsional

Berdasarkan peta jabatan BaTii, terdapat dua belas jenis jabatan fungsional yang terdiri dari:

1. Analisis SDM Aparatur;
2. Pranata SDM Aparatur;
3. Asesor SDM Aparatur;
4. Analis Anggaran;
5. Arsiparis;
6. Analis Pengelolaan Keuangan APBN;
7. Pranata Keuangan APBN;
8. Penata Laksana Barang;
9. Analis Keuangan Negara;
10. Pengawas Keuangan Negara;
11. Pranata Humas;
12. Pranata Komputer.

Dari ke-12 jabatan fungsional tersebut, terdapat tiga jabatan fungsional yang telah diimplementasikan pada BaTii, yaitu Pranata Komputer, Pranata Keuangan APBN, dan Analis Keuangan Negara. Kedepannya, seluruh jabatan fungsional yang terdapat pada peta jabatan akan diimplementasikan secara bertahap.

BaTii selaku Unit Pembina Internal (UPI) Jabatan Fungsional Pranata Komputer di lingkungan Kemenkeu mengelola seluruh Pejabat Fungsional Pranata Komputer Kemenkeu. Pengelolaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer level Kemenkeu akan dituangkan dalam bentuk kebijakan teknis.

Pemetaan kompetensi Jabatan Fungsional Pranata Komputer merupakan proses identifikasi atas pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing Pejabat Fungsional Pranata Komputer. Dengan adanya pemetaan kompetensi, Pejabat Fungsional Pranata Komputer dapat ditempatkan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya untuk mendukung pengerjaan proyek TIK Kemenkeu. Selain itu, pemetaan kompetensi juga dapat membantu dalam pemenuhan *gap* kompetensi yang perlu ditingkatkan pada saat proses perancangan program pelatihan dan pengembangan Pejabat Fungsional Pranata Komputer.

Dalam rangka pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional khususnya Pranata Komputer, akan dilakukan penyusunan *learning path* dengan tujuan agar Pejabat Fungsional Pranata Komputer yang akan menduduki jenjang jabatan yang dituju harus memiliki kompetensi yang sesuai. Selain itu, *learning path* juga memiliki tujuan dalam mendukung pengembangan karier dan meningkatkan kompetensi seorang Pejabat Fungsional.

- 4) Penguatan Budaya Organisasi yang berintegritas dan kolaboratif lintas unit serta lintas generasi (Kemenkeu Satu)

Strategi terkait budaya organisasi sebagai berikut:

- a. Pembangunan ZI-WBK/WBBM di lingkungan BaTii.
- b. Pengembangan dan penerapan budaya inovasi melalui implementasi *sandbox*.
- c. Perwujudan *Champion Office*.
- d. Pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Layanan.
- e. Pemenuhan Penilaian untuk maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- f. Penguatan budaya integritas melalui implementasi pengawasan dan SPIT, serta pembangunan lingkungan kerja saling jaga, saling peduli, dan sadar risiko.
- g. Transformasi budaya kerja struktural ke fungsional.

3.4.2. Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Manusia

A. Kondisi SDM BaTii Saat Ini

Berdasarkan Data pegawai yang terdapat pada aplikasi HRIS per tanggal 17 Desember 2025, total pegawai BaTii yang berstatus aktif adalah sejumlah 453 orang yang tersebar pada tujuh unit eselon II. Komposisi SDM tersebut dapat dikelompokkan menurut golongan, jabatan, jenjang pendidikan, generasi, gender, dan unit eselon II tempat pegawai menjalankan tugas.

- 1) Komposisi SDM Berdasarkan Golongan

Berdasarkan golongan, pegawai BaTii dapat terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu golongan II, golongan III, dan golongan IV. Rincian ketiga golongan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Golongan II sebanyak 38 orang atau sebesar 8,4%
2. Golongan III sebanyak 380 orang atau 83,9%
3. Golongan IV sebanyak 35 orang atau 7,7%

Dari ketiga kelompok di atas, jumlah kelompok terbanyak di BaTii adalah golongan III dengan besaran persentase 84% atau 380 dari total 453 orang.

- 2) Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan

Secara umum, komposisi SDM berdasarkan jabatan dapat dikelompokkan menjadi jabatan struktural dan jabatan

fungsional. Jabatan struktural terbagi menjadi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya atau Pejabat Eselon I, JPT Pratama atau Pejabat Eselon II, Pejabat Administrator atau Pejabat Eselon III, Pejabat Pengawas atau Pejabat Eselon IV, dan Pelaksana. Sedangkan Jabatan Fungsional terbagi menjadi berbagai jenjang, yaitu Jabatan Fungsional Madya, Jabatan Fungsional Muda, Jabatan Fungsional Pertama, Jabatan Fungsional Penyelia, Jabatan Fungsional Mahir, dan Jabatan Fungsional Terampil. Jika melihat data yang ada, komposisi terbanyak pegawai BaTii adalah pegawai dengan jabatan fungsional yaitu sejumlah 277 orang atau 61,1%. Sementara itu, kelompok pegawai dengan jabatan struktural memiliki jumlah 176 orang atau sebesar 38,9%.

Tabel 3.1
Komposisi SDM BaTii berdasarkan Jabatan

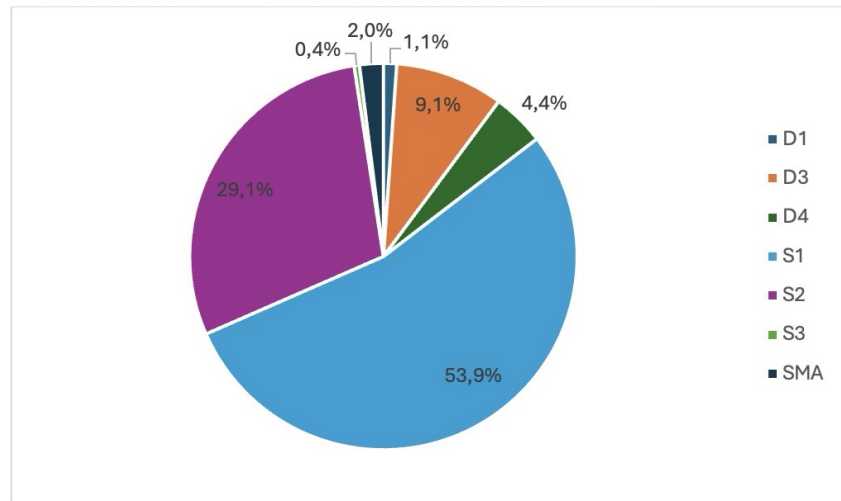
Jabatan Struktural	Jumlah	Jabatan Fungsional	Jumlah
Pejabat Administrator	12	JF Madya	7
Pejabat Pengawas	33	JF Mahir	15
Pelaksana	128	JF Muda	102
		JF Penyelia	3
		JF Pertama	130
		JF Terampil	12
		JPT Madya	1
JPT Pratama	7		
Total	176	Total	277
Grand Total		453	

- 3) Komposisi SDM Berdasarkan Jenjang Pendidikan Berdasarkan jenjang pendidikan terakhir yang dimiliki para pegawai BaTii, teridentifikasi tujuh kelompok mulai dari SMA, Diploma Satu sampai dengan S-3 (program doktoral). Komposisi masing-masing kelompok tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
- Pendidikan terakhir SMA sebanyak 9 orang atau 2%
 - Pendidikan terakhir D-I sebanyak 6 orang atau 1,3%
 - Pendidikan terakhir D-III sebanyak 41 orang atau 9,1%
 - Pendidikan terakhir D-IV sebanyak 20 orang atau 4,4%
 - Pendidikan terakhir S-1 sebanyak 243 orang atau 53,6%
 - Pendidikan terakhir S-2 sebanyak 131 orang atau 28,9%
 - Pendidikan terakhir S-3 sebanyak 2 orang atau 0,4%
- Dari tujuh kelompok di atas, dapat terlihat bahwa pegawai dengan pendidikan terakhir S-1 (program sarjana) masih

menjadi mayoritas di lingkungan BaTii dengan persentase sebesar 53,6% atau lebih dari setengah total pegawai. Sedangkan pendidikan tertinggi saat ini yaitu S-3 (program doktoral) dipegang hanya oleh dua orang atau sebesar 0,4%. Sementara itu, pendidikan terendah yang dimiliki oleh pegawai BaTii adalah jenjang SMA dan tidak ada jenjang SMP ke bawah.

Grafik 3.1

Komposisi SDM BaTii berdasarkan Jenjang Pendidikan



4) Komposisi SDM Berdasarkan Generasi

Data pegawai menunjukkan bahwa hanya terdapat tiga kelompok generasi di BaTii, yaitu Generasi X, Generasi Y, dan Generasi Z. Pembagian generasi tersebut adalah berdasarkan rentang tahun lahir pegawai dimana terbagi menjadi:

- a. Tahun lahir 1965 – 1980 (Generasi X)
- b. Tahun lahir 1981 – 1996 (Generasi Y atau Generasi Milenial)
- c. Tahun lahir 1997 – 2012 (Generasi Z)

Generasi yang paling mendominasi pada unit BaTii dengan jumlah 379 dari total 453 pegawai adalah Generasi Y/ Milenial. Secara persentase, jumlah tersebut mencapai 83,7%. Sedangkan sisa 16,3% merupakan gabungan dari Generasi X dan Z, dimana Generasi X sedikit lebih besar dari Z dengan jumlah 59 orang atau 13%, sementara Generasi Z hanya 15 orang atau 3,3% saja.

5) Komposisi SDM Berdasarkan Gender

Komposisi pegawai di lingkungan BaTii berdasarkan jenis kelamin/gender masih didominasi laki-laki dengan jumlah 306 orang atau 67,5%. Sedangkan pegawai perempuan memiliki jumlah 147 orang atau 32,5%. Perbedaan jumlah tersebut tidak dipengaruhi faktor spesifik tertentu karena memang dalam proses rekrutmen pegawai baik dari umum

maupun lulusan PKN STAN tidak secara khusus merujuk pada salah satu gender. Selain itu pada unit kerja BaTii tidak terdapat jenis pekerjaan yang mensyaratkan atau cenderung pada gender tertentu.

6) Komposisi SDM Per Unit Es II

Adapun sebaran SDM per unit eselon II sebagai berikut:

- a. Setban dengan jumlah pegawai sebesar 81 orang atau 17,8%
- b. Pusementap dengan jumlah pegawai sebesar 21 orang atau 4,6%
- c. Pusakti dengan jumlah pegawai sebesar 43 orang atau 9,5%
- d. Puspensi dengan jumlah pegawai sebesar 99 orang atau 21,9%
- e. Pusdatin dengan jumlah pegawai sebesar 59 orang atau 13%
- f. Pusilki dengan jumlah pegawai sebesar 126 orang atau 27,8%
- g. Pusintek dengan jumlah pegawai sebesar 23 orang atau 5,1%

Distribusi pegawai BaTii untuk setiap unit eselon II dilakukan dengan mempertimbangkan penugasan dan kebutuhan SDM untuk melaksanakan penugasan tersebut.

B. Proyeksi Kebutuhan dan Pengembangan SDM BaTii 2025-2029

Seiring dengan pembentukan organisasi BaTii, tuntutan terhadap kinerja organisasi dan profesionalisme SDM BaTii terus meningkat. Kuantitas dan kualitas SDM BaTii berperan penting dalam menjawab tantangan dan tanggung jawab organisasi. Proyeksi kebutuhan SDM BaTii disusun berdasarkan asumsi:

- a. Tidak terdapat perubahan organisasi secara masif;
- b. Peningkatan produktivitas rata-rata 7%-15% dengan melakukan *upskilling*, *reskilling*, *newskilling*, dan digitalisasi proses bisnis;
- c. Penambahan pegawai baru dari rekrutmen CPNS dan mutasi antar Unit Eselon I dan Kementerian/Lembaga;
- d. Proyeksi pegawai keluar yang dihitung berdasarkan jumlah pegawai pensiun sampai dengan 2029 dan proyeksi *turn over* yang terdiri dari meninggal dunia, pindah instansi dan penugasan.

Berdasarkan perhitungan data HRIS, jumlah pegawai BaTii yang akan memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) sampai dengan 31 Desember 2029 sejumlah dua belas orang. Proyeksi kebutuhan SDM BaTii akan dipenuhi dengan

mempertimbangkan optimalisasi sumber daya dan kebutuhan organisasi.

C. Arah kebijakan dan strategi pengelolaan SDM Tahun 2025-2029

Untuk mendukung pelaksanaan tugas BaTii dalam penyusunan *roadmap* transformasi, pengelolaan TIK, pengelolaan data, dan pelaksanaan intelijen keuangan, perlu dilakukan penyiapan SDM BaTii yang memenuhi kebutuhan secara kualitas dan kuantitas. Strategi pengelolaan SDM lima tahun ke depan:

1. Peningkatan kualitas perencanaan dan penataan postur SDM BaTii

Perencanaan kebutuhan SDM dimulai dengan perencanaan *output* organisasi, kategorisasi penugasan dan identifikasi *requirement* SDM untuk melaksanakan tugas. Data tersebut akan menjadi dasar penentuan postur SDM BaTii selanjutnya meliputi jumlah (1) SDM ASN yang dibutuhkan, termasuk jumlah jabatan fungsional di setiap levelnya dan jumlah Pelaksana; dan (2) SDM Non ASN yang dibutuhkan di setiap kategori pekerjaan maupun di setiap kategori kompetensi teknis;

2. Penyusunan *learning path* dan *learning journey* Pejabat Fungsional Pranata Komputer

Learning path dan *learning journey* ini akan dapat diterapkan pada Jabatan Fungsional Pranata Komputer Kemenkeu. Kebutuhan pembelajaran ini selanjutnya akan didukung dengan identifikasi *gap* kompetensi melalui *training need analysis* dan pelaksanaan kegiatan sertifikasi. Selain mengembangkan peta pembelajaran Jabatan Fungsional Pranata Komputer, BaTii juga terlibat dalam penyusunan *learning path* Jabatan Fungsional Keuangan Negara;

3. Penyusunan *Career Path* dan implementasi Manajemen Talenta di Lingkungan BaTii

Sebagai bentuk pengelolaan karier yang adil, transparan dan terencana, BaTii akan menyusun pola karier pegawai di jalur karier struktural maupun fungsional. Pola karier tersebut juga akan meliputi implementasi manajemen talenta yang mengatur syarat pengisian jabatan kritical melalui jalur promosi.

4. Peningkatan kompetensi SDM melalui (1) pemetaan keahlian TIK (kebutuhan dan kondisi saat ini); (2) pengembangan kompetensi terintegrasi

Pemetaan keahlian (utamanya terkait TIK) diperlukan untuk mengetahui kompetensi yang telah dimiliki, dan identifikasi *gap* kompetensi, sehingga dapat dilakukan redistribusi SDM TIK di Kemenkeu. Pengembangan kompetensi terintegrasi adalah program

pengembangan yang disusun dengan memastikan pelaksanaan 10% pembelajaran formal (*training*, sertifikasi, *workshop*, diklat, seminar); 20% pembelajaran sosial (*coaching*, *mentoring*, *sharing*); dan 70% pembelajaran *experiential* (penugasan terstruktur). Pengembangan terintegrasi diterapkan dalam mengembangkan kompetensi teknis dan manajerial sosial kultural pegawai. Salah satu kompetensi manajerial yang akan menjadi fokus pengembangan bagi pegawai BaTii adalah terkait komunikasi dan pelayanan publik. Hal ini penting menimbang peran BaTii dalam menyusun dan menyelaraskan strategi transformasi Kemenkeu dan penyediaan layanan digitalisasi, layanan data, dukungan TIK dan layanan intelijen. Kebutuhan tersebut juga tercermin dari hasil analisis *gap* kompetensi manajerial dan sosial kultural pegawai BaTii.

5. Penguatan tata kelola SDM Non ASN

Perkembangan kompetensi teknis di dunia TIK berlangsung demikian cepat dan dinamis. Hal tersebut tidak diikuti dengan kecepatan pengembangan kompetensi internal SDM. Salah satu opsi penyediaan SDM yang dapat digunakan adalah penggunaan SDM Non ASN untuk memenuhi kebutuhan SDM TIK dengan kompetensi yang belum tersedia secara internal dalam waktu yang relatif singkat. SDM Non ASN yang dimaksud terdiri dari Pegawai Pemerintahan Non PNS (PPNPN), Tenaga Ahli dan pegawai magang. Perlu mekanisme yang mengatur metode identifikasi kebutuhan, cara pemenuhan, dan pertanggungjawaban. Hal tersebut bertujuan agar proses pemenuhan kebutuhan SDM Non ASN dapat dilakukan secara efisien dan akuntabel.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dan juga Kemenkeu, BaTii menetapkan lima tujuan utama yang dijabarkan ke dalam lima sasaran strategis. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis tersebut dalam kurun waktu lima tahun sejak 2025, dirumuskan Indikator Kinerja Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Program sebagai berikut.

Tabel 4.1
Target Kinerja BaTii Tahun 2025-2029

No	Tujuan/ Sasaran Strategis / Indikator	Target					
		2025	2026	2027	2028	2029	
1	Peta jalan transformasi yang inovatif, berkelanjutan dan berdampak untuk penyempurnaan proses bisnis Kementerian Keuangan.						
	a.	Transformasi dan Manajemen Perubahan Kementerian Keuangan yang Berkesinambungan dan Berdampak					
	1)	Tingkat keberhasilan transformasi Kemenkeu	100%	100%	100%	100%	100%
2	Layanan digital yang berkualitas, mudah, dan andal						
	a.	Arsitektur, tata kelola, sistem, dan infrastruktur teknologi informasi yang terkini, terintegrasi, serta aman.					
	1)	Tingkat keandalan sistem informasi Kemenkeu	100%	100%	100%	100%	100%
	2)	Tingkat kepuasan <i>stakeholder</i> dan pengguna layanan	100%	100%	100%	100%	100%
	3)	Persentase pengembangan sistem informasi yang bernilai tambah	100%	100%	100%	100%	100%
3	Data yang berkualitas tinggi, akurat, dan relevan untuk penyusunan strategi dan arah kebijakan						
	a.	Data yang akurat dan relevan untuk strategi kebijakan.					
	1)	Tingkat kualitas pengelolaan dan penyediaan data	100%	100%	100%	100%	100%
4	Informasi yang tepercaya untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan ekonomi, fiskal, dan sektor keuangan						
	a.	Informasi tepercaya untuk rekomendasi kebijakan ekonomi dan keuangan.					
	1)	Tingkat efektivitas rekomendasi intelijen keuangan	100%	100%	100%	100%	100%
5	Pengelolaan sumber daya organisasi yang adaptif dan efisien						
	a.	SDM yang unggul, organisasi yang <i>agile</i> , pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta pengendalian internal yang efektif					
	1)	Tingkat kualitas pengelolaan SDM keuangan negara	100%	100%	100%	100%	100%

No	Tujuan/ Sasaran Strategis / Indikator		Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
	2)	Indeks kualitas penerapan sistem pengendalian internal (SPI) terintegrasi	92,5	93	93,5	94	94,5
	3)	Indeks kualitas pengelolaan keuangan	100	100	100	100	100

Indikator kinerja BaTii tahunan secara rinci akan ditetapkan dalam dokumen berupa Rencana Kerja BaTii dan/atau Kontrak Kinerja Kepala BaTii (Kemenkeu-One).

4.2. Kerangka Pendanaan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BaTii memerlukan dukungan berbagai macam sumber daya. Salah satu sumber daya tersebut adalah sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BaTii selama lima tahun sampai dengan tahun 2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Indikasi Kebutuhan Pendanaan
Tahun 2025-2029

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	Program	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7
1	Program Dukungan Manajemen	723.415	1.549.227	859.067	933.900	970.222
	<i>Pengelola Keuangan, BMN, dan Umum</i>	500.948	886.722	634.424	708.258	740.200
	<i>Pengelolaan Organisasi dan SDM</i>	6.716	16.886	6.716	6.989	7.126
	<i>Manajemen Sistem Informasi</i>	212.792	639.386	212.792	213.397	217.580
	<i>Intelijen Ekonomi dan Keuangan</i>	-	2.176	2.176	2.176	2.176
	<i>Manajemen Transformasi Strategik</i>	2.959	4.057	2.959	3.080	3.140
Total Pagu		723.415	1.549.227	859.067	933.899	970.222

Pendanaan pada tahun 2025 merupakan pendanaan sejak terbentuknya BaTii sampai dengan akhir tahun. Selengkapnya mengenai target kinerja dan kerangka pendanaan BaTii Tahun 2025-2029 sebagaimana tersebut dalam Matriks Kinerja dan Pendanaan BaTii Tahun 2025-2029 pada bagian akhir Renstra ini.

BAB V PENUTUP

Renstra BaTii disusun dengan berpedoman pada beberapa aturan. Pertama, Renstra BaTii disusun berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Kedua, Renstra berpedoman pada RPJMN tahun 2025-2029 yang disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 dan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Nasional. Ketiga, Renstra berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 dan memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi, dan strategi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kemenkeu. Keempat, Renstra BaTii juga berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

Visi BaTii adalah “Menjadi penggerak utama transformasi Kementerian Keuangan melalui penyediaan teknologi terkini dan informasi yang berkualitas untuk menjaga kebijakan ekonomi, fiskal, dan sektor keuangan”, untuk mendukung Visi dan Misi Kemenkeu “Menjadi penggerak transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan negara serta sektor keuangan yang proaktif, adaptif, dan tepercaya dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”. Visi BaTii juga mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden ” Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”.

BaTii mempunyai lima misi dalam mewujudkan visi BaTii, yang meliputi: (1) Mengembangkan peta jalan transformasi yang inovatif, berkelanjutan dan berdampak untuk penyempurnaan proses bisnis Kementerian Keuangan; (2) Mewujudkan layanan digital yang berkualitas, mudah, dan andal melalui pengembangan arsitektur, tata kelola, sistem, serta infrastruktur teknologi informasi yang terkini, terintegrasi, dan didukung oleh penguatan keamanan informasi; (3) Menyediakan data yang berkualitas tinggi, akurat, dan relevan untuk penyusunan strategi dan arah kebijakan; (4) Memanfaatkan dan mengolah informasi untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan ekonomi, fiskal, dan sektor keuangan; dan (5) Mengelola sumber daya organisasi secara adaptif dan efisien.

Visi dan Misi BaTii dimaksud mendukung tujuan Kemenkeu yang kelima, yaitu: "5. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu yang mendorong akselerasi transformasi birokrasi nasional. Pencapaian tujuan tersebut diukur dengan indikator yaitu Indeks Kepuasan Pengguna Layanan", di mana tujuan tersebut memiliki rumusan sasaran strategis yang direspons oleh BaTii dengan strategi-strategi yang mengelaborasi kondisi nyata yang akan dicapai oleh Kemenkeu. Renstra BaTii disusun mengikuti sistematika penulisan renstra unit organisasi menurut Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025, yaitu (1) Bab I – Pendahuluan, (2) Bab II – Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis, (3) Bab III – Arah Kebijakan dan Strategi, Kerangka

Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan, (4) Bab IV – Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan, dan (5) Bab V – Penutup.

Dokumen Renstra BaTii Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja setiap tahun. Untuk mewujudkan rencana strategis ini, diperlukan komitmen penuh dari seluruh pemangku kepentingan di BaTii. Pelaksanaan Renstra ini juga diharapkan dapat mendukung transformasi dan manajemen perubahan Kemenkeu, meningkatkan kualitas layanan internal dan publik berbasis teknologi yang andal, serta menghasilkan rekomendasi ekonomi, fiskal, dan keuangan yang kredibel.

A. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2025-2029
RENCANA STRATEGIS BADAN TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN INTELIJEN KEUANGAN TAHUN 2025-2029

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
Program	WA Dukungan Manajemen													
Sasaran Program	1. Perbaikan kualitas pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik													
Indikator Kinerja Program	Nilai evaluasi organisasi - Kementerian Keuangan (BaTI)		100	100	100	100	100							
Sasaran Program	2. Penguatan transformasi digital pada ekosistem keuangan negara													
Indikator Kinerja Program	Tingkat keandalan sistem informasi Kementerian Keuangan – Kementerian Keuangan (BaTI)		100%	100%	100%	100%	100%							
Kegiatan	7774 Pengelolaan Keuangan. BMN. dan Umum													Setban
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Keuangan. BMN. dan Umum yang Efisien. Efektif dan Akuntabel													
Indikator Kinerja Kegiatan	Indeks Kinerja Anggaran		100 (indeks)	100 (indeks)	100 (indeks)	100 (indeks)	100 (indeks)							
Output	Layanan Dukungan Manajemen Internal							478,724.79	863,063.10	612,200.56	686,033.96	717,540.81		
	Kerumahtanggaan		7 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	3,281.23	3,213.66	3,281.23	3,415.10	3,482.03		
	Layanan Barang Milik Negara (BMN) dan Pengadaan		7 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	20.00	20.00	20.00	20.82	21.22		
	Layanan Perkantoran		7 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	475,423.56	859,829.45	608,899.34	682,598.05	714,037.55		
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							22,219.59	23,655.34	22,219.59	22,219.59	22,655.17		
	Kendaraan Bermotor		1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	430.08	430.08	430.08	430.08	438.51		
	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran		15 Unit	94 Unit	94 Unit	94 Unit	94 Unit	5.39	1,437.14	5.39	5.39	5.49		
	Gedung/Bangunan		500 m2	500 m2	500 m2	500 m2	500 m2	21,784.12	21,788.12	21,784.12	21,784.12	22,211.17		
	Layanan Manajemen Kinerja Internal							4.00	4.00	4.00	4.00	4.00		
	Rencana Kerja dan Anggaran Unit		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
	Dokumen Perbendaharaan Unit		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
	Laporan Keuangan Unit		1 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
	Rencana Strategis Tingkat Unit		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
Kegiatan	7775 Pengelolaan Organisasi dan SDM													Setban
Sasaran Kegiatan	Pengelolaan Keuangan. BMN. dan Umum yang Efisien. Efektif dan Akuntabel													
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat Pengembangan Talenta Digital		95%	95%	95%	95%	95%							
Output	Layanan Dukungan Manajemen Internal							3,814.79	12,032.54	3,814.79	3,970.43	4,048.25		
	Layanan Perkantoran		7 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	12 Layanan	3,814.79	12,032.54	3,814.79	3,970.43	4,048.25		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Output	Layanan Manajemen SDM Internal							2,899.81	4,852.47	2,899.81	3,018.17	3,077.34	Setban
	Administrasi Kepegawaian Tingkat Eselon I		314 Orang	440 Orang	440 Orang	440 Orang	440 Orang	326.64	992.20	326.64	339.97	346.63	
	Pengelolaan Jafung		1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	424.12	797.21	424.12	441.43	450.08	
	Pengembangan SDM Tingkat Eselon I		314 Orang	440 Orang	440 Orang	440 Orang	440 Orang	2,149.05	3,063.06	2,149.05	2,236.77	2,280.63	
	Layanan Manajemen Kinerja Internal							1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
	Rekomendasi Kepatuhan Internal		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
Kegiatan	7776 Manajemen Sistem Informasi							212,792.22	639,385.99	212,792.22	213,397.35	217,579.94	Pusakti Pusilki Pusdatin Puspensi
Sasaran Kegiatan	Pengembangan Sistem Informasi yang Berkualitas dan Efisien												
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Pengembangan Sistem Informasi yang Bernilai Tambah		100%	100%	100%	100%	100%						
Output	Sistem Informasi Pemerintahan							212,792.22	639,385.99	212,792.22	213,397.35	217,579.94	
	Pengembangan Super Apps Kemenkeu (PU)		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	3,456.48	7,997.76	3,456.48	3,597.51	3,668.02	
	Sistem Informasi Property Nasional (PU) (PPPJK)		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	2,394.27	1.00	2,394.27	2,394.27	2,441.20	
	Sistem Informasi Keuangan Daerah (PU) (DJPK)		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1,521.55	1.00	1,521.55	1,548.72	1,579.07	
	Layanan Teknologi Informasi Kemenkeu		7 Sistem Informasi	7 Sistem Informasi	7 Sistem Informasi	7 Sistem Informasi	7 Sistem Informasi	10,709.11	12,777.56	10,709.11	11,146.05	11,364.51	
	Dukungan Teknis Layanan Teknologi Informasi Kemenkeu		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
	Pengembangan Sistem Informasi Kemenkeu		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	194,708.81	618,606.67	194,708.81	194,708.81	198,525.14	
	Layanan Pusat Data dan Informasi		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
Kegiatan	7777 Intelijen Ekonomi dan Keuangan							-	2,175.70	2,175.70	2,175.70	2,175.70	Pusintek
Sasaran Kegiatan	Intelijen Ekonomi dan Keuangan yang Efektif												
Indikator Kinerja Kegiatan	Tingkat Efektivitas Intelijen Ekonomi Keuangan		100 (Indeks)	-	-	-	-						
	Indeks Efektivitas Rekomendasi Intelijen Keuangan		-	80 (Indeks)	80 (Indeks)	80 (Indeks)	80 (Indeks)						
Output	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan							-	1,180.96	1,180.96	1,180.96	1,180.96	
	Kebijakan Intelijen Ekonomi dan Keuangan		-	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	-	1,180.96	1,180.96	1,180.96	1,180.96	
	Pengawasan dan Pengendalian Layanan							-	994.74	994.74	994.74	994.74	
	Intelijen Ekonomi dan Keuangan		-	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	-	994.74	994.74	994.74	994.74	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Kegiatan	7778 Manajemen Transformasi Strategik							2,958.98	4,056.96	2,958.98	3,079.71	3,140.07	Pusmantap Pusakti
Sasaran Kegiatan	Transformasi Teknologi Informasi serta Pemanfaatan AI yang Andal dan Terintegrasi												
Indikator Kinerja Kegiatan	Persentase Implementasi ISRBTk		95%	-	-	-	-						
	Persentase Implementasi ISRBTk dan <i>Data Analytics</i>		-	100%	100%	100%	100%						
Output	Kebijakan Bidang Tata Kelola Pemerintahan							2,958.98	4056.96	2,958.98	3,079.71	3,140.07	
	Kebijakan Pengelolaan TIK Kemenkeu		1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	116.60	81.80	116.60	121.36	123.74	
	Rekomendasi Transformasi Kemenkeu		1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	1 Rekomendasi Kebijakan	2,842.38	3975.16	2,842.38	2,958.35	3,016.33	

C. MATRIKS KERANGKA REGULASI
RENCANA STRATEGIS BADAN TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN INTELIJEN KEUANGAN TAHUN 2025-2029

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1	Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Kelola TIK Kemenkeu	a. Perlunya aturan dasar/tata kelola TIK untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan perkembangan TIK; b. Perlunya aturan dasar/tata kelola TIK untuk meningkatkan peran TIK dalam mewujudkan visi dan misi Kemenkeu serta mendukung transformasi digital di lingkungan Kemenkeu; dan c. Perlunya penyesuaian dengan kebijakan TIK di level nasional, sehingga PMK Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Kementerian Keuangan perlu dimutakhirkan.	Pusakti	Unit Eselon I/Non Eselon di Lingkungan Kemenkeu, Kemenkum, Komdigi, Kemenpan RB, BSSN	2027
2	RKMK tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Kemenkeu	Perlunya aturan mengenai ketentuan teknis penyelenggaraan SPBE untuk melaksanakan ketentuan pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyelenggaraan SPBE	Pusakti	Unit Eselon I/Non Eselon di Lingkungan Kemenkeu	2025
3	RKMK Peta Rencana SPBE Kemenkeu (Peta Jalan	Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan tentang	Pusakti	Unit Eselon I/Non Eselon di	2026

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	Pengembangan TIK (Kemenkeu)	<p>Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Kemenkeu, diperlukan peraturan teknis terkait peta rencana SPBE (peta jalan pengembangan TIK Kemenkeu) untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> menyediakan arah yang jelas dan terukur bagi pengembangan SPBE Kemenkeu atau pengembangan TIK Kemenkeu; menghindari duplikasi inisiatif dan memastikan keselarasan antar-unit; menjamin konsistensi implementasi SPBE atau implementasi TIK dengan target nasional; dan meningkatkan efektivitas pemanfaatan sumber daya TIK. 		Lingkungan Kemenkeu	
4	Rancangan Keputusan Menteri Keuangan tentang Program Transformasi Kemenkeu	Perlunya aturan yang mengatur mengenai arah kebijakan Kemenkeu selama 5 tahun kedepan, program dan rencana prioritas, serta tata kelola transformasi Kemenkeu.	Pusmantap	Unit Eselon I/Non Eselon di Lingkungan Kemenkeu	2026

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
5	Rancangan Keputusan Menteri Keuangan tentang Ketentuan Teknis Tata Kelola TIK Kemenkeu	RKMK ini disusun untuk memutakhirkan RKMK tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan SPBE yang rencananya akan diselesaikan pada tahun 2025 karena adanya penetapan RPKM Tata Kelola TIK Kemenkeu pada tahun 2027.	Pusakti	Unit Eselon I/Non Eselon di Lingkungan Kemenkeu	2028

KEPALA BADAN TEKNOLOGI, INFORMASI,
DAN INTELIJEN KEUANGAN,



Ditandatangani secara elektronik
SURYO UTOMO

